

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN EKONOMI
MASYARAKAT PASCA TSUNAMI
DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**
(Studi di Desa Way Muli Timur Kecamatan Rajabasa
Kabupaten Lampung Selatan)

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh:
Noviani Citra Dewi
NPM. 1621020227
Jurusan: Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)



Pembimbing I : Dra. Firdaweri, M.H.I
Pembimbing II : Fathul Mu'in, S.H.I., M.H.I

**FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/2020 M**

ABSTRAK

Indonesia merupakan salah satu negara yang terletak pada sabuk gunung berapi pasifik, kondisi ini menyebabkan banyak gunung berapi di Indonesia. Salah satu gunung berapi di Indonesia yang masih aktif adalah Gunung Berapi Anak Krakatau yang terletak di Selat sunda. Akibat erupsi anak Gunung Krakatau yang terjadi pada Sabtu malam tanggal 22 Desember 2018, mengakibatkan tsunami yang menerjang sebagian Pulau Jawa dan Pulau Sumatera sebagian wilayah Kabupaten Lampung Selatan dan di Desa Way Muli Timur Kecamatan Rajabasa terparah terkena dampaknya. Yang mengakibatkan mata pencaharian masyarakat terputus. Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Desa adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Bencana Alam yaitu Pemerintah Desa menjadi penanggungjawab penyelenggaraan penanggulangan bencana. Atas amanat Undang-Undang tersebut Pemerintah Desa Kabupaten Lampung Selatan wajib berperan dalam menanggapi bencana tsunami yang terjadi di Desa Way Muli Timur sampai dengan pemulihan dan meningkatkan kembali ekonomi masyarakat. Permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: Apa peran Pemerintah Desa Kabupaten Lampung Selatan dalam meningkatkan kembali ekonomi masyarakat pasca tsunami. Bagaimana pandangan *fiqh siyasah* terhadap peran Pemerintah Desa dalam meningkatkan kembali ekonomi masyarakat pasca tsunami di Desa Way Muli Timur Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah: Mengetahui tentang Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Pasca Tsunami. Mengetahui tentang pandangan *fiqh siyasah* terhadap Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Pasca Tsunami di Desa Way Muli Timur Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan, penelitian ini bersifat deskriptif dengan sumber data primer dan data sekunder, metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data dilakukan dengan kualitatif dengan metode berfikir Induktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Peran Pemerintah Desa Kabupaten Lampung Selatan yang bekerja sama dengan aparat Pemerintah Desa Way Muli Timur dalam menanggapi tanggap darurat korban bencana pasca tsunami untuk memulihkan kondisi ekonomi masyarakat Desa Way Muli Timur sudah sejalan dengan apa yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Tentang Daerah. Berdasarkan pandangan *fiqh siyasah*, terhadap peran Pemerintah Desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat pasca tsunami di Desa Way Muli Timur Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan, hal tersebut sudah sejalan dengan prinsip-prinsip pemerintahan dalam *fiqh siyasah dusturiyah*. Adapun kendala Pemerintah Desa dalam peningkatan kembali ekonomi masyarakat pasca tsunami di Desa Way Muli Timur yaitu: Bantuan tidak sampai ke sasaran karena tempat tinggal mereka terpisah jauh dan minimnya tenaga untuk menyampaikan bantuan tersebut. Terbatasnya/rusaknya sarana dan prasarana yang disebabkan oleh bencana tsunami yang menyulitkan Pemerintah Desa dalam menyalurkan bantuan-bantuan untuk korban tsunami di Desa Way Muli Timur Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Letkol. Hendro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Tlp (0721)703260

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Noviani Citra Dewi
NPM : 1621020227
Jurusan/Prodi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Pasca Tsunami Dalam Perspektif Fiqh Siyasah”. (Studi di Desa Way Muli Timur Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan), adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 25 Juni 2020
Penulis,

Materai 6000

Noviani Citra Dewi
NMP. 1621020227



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Letkol. Hendro Suratmin Sukarama Bandar Lampung 35131 Tlp (0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan
Ekonomi Masyarakat Pasca Tsunami Dalam
Perspektif Fiqh Siyasah. (Studi di Desa Way
Muli Timur Kecamatan Rajabasa Kabupaten
Lampung Selatan).**

**Nama : Noviani Citra Dewi
NPM : 1621020227
Jurusan : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iiyyah)
Fakultas : Syari'ah**

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang
Munaqosah Fakultas Syari'ah Universitas Islam
Negeri Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Pembimbing II

Dra. Firdaweri, M.H.I

Fathul Mu'in, S.H.I., M.H.I

NIP.195509191982032004

Mengetahui

Ketua Jurusan Siyasah

Frenki, M.S.I

NIP. 19800315200911017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN
INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Letkol. Hendro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Tlp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : “Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Pasca Tsunami Dalam Perspektif Fiqh Siyasah”. (Studi di Desa Way Muli Timur Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan), disusun oleh: Noviani Citra Dewi, NPM: 1621020227, Jurusan: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah), telah di ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari'ah pada Hari/Tanggal:

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si

Sekretaris : Erik R. Gumiri, M.H.

Penguji I : Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag. MH.

Penguji II : Dra. Firdaweri, M.H.I.

Penguji III : FathulMu'in, S.H.I., M.H.I.



Mengetahui

Dean Fakultas Syari'ah

Dr. Iqbal Khairuddin, M.H.

NIP. 196210211993031002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.

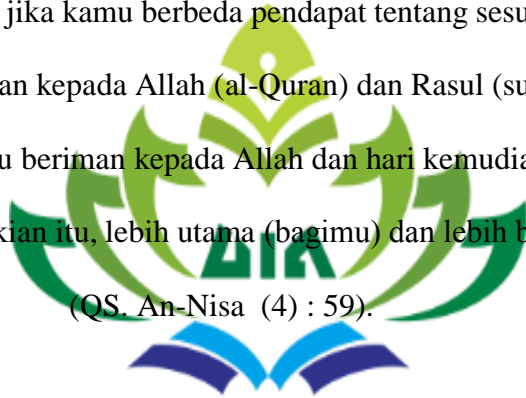
“Hai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan Rasul dan
ulil amri diantara kamu.

Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu,
maka kembalikan kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (sunahnya),

jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian.

Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik”.

(QS. An-Nisa (4) : 59).



PERSEMBAHAN

Allhamdulillah Hirhabbil 'Alamin dengan penuh rasa syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Penyanyang lagi Maha Pengasih. Setelah sekian banyak proses yang panjang akhirnya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Untuk melewati proses ini tidaklah mudah tanpa adanya dukungan dan do'a dari orang-orang yang sangat penulis sayangi. Skripsi ini kupersembahkan sebagai bentuk dari ungkapan rasa syukur dan terima kasih yang sangat mendalam kepada:

1. Kedua orang tuaku Ayahanda Sukamto dan Ibunda Suhartiningsih yang telah ikhlas mengasuh dan mendidikku. Ucapan terima kasih atas kasih sayang, dukungan, serta pengorbanan yang begitu besar dan mulia. Berkat cucuran keringat dan do'a tulusmu penulis dapat menyelesaikan penelitian ini sampai bisa mendapatkan gelar S1 di UIN Raden Intan Lampung.
2. Saudara tercinta Doni Sudarmanto dan Agung Hendiarto yang telah memberikan dukungan, semangat kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikanku di UIN Raden Intan Lampung.
3. Sanak familiku yang senantiasa memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung.
4. Seluruh dosen UIN Raden Intan Lampung dan khususnya kepada dosen Fakultas Syari'ah yang selalu ilmunya kepada penulis dengan ikhlas.
5. Yang kubanggakan almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing penulis dalam berfikir dan bertindak.

RIWAYAT HIDUP

Noviani Citra Dewi dilahirkan di Desa Kelaten Kecamatan. Penengahan Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 30 November 1998, anak tunggal dari pasangan Bapak Sukamto dan Ibu Suhartiningsih.

Pendidikan formal penulis, dimulai sejak pendidikan Sekolah Dasar di SDN 2 Kelaten tahun 2004 dan lulus pada tahun 2010. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Penengahan selesai pada tahun 2010 dan selesai pada tahun 2013. Selama di SMPN 1 Penengahan penulis mengikuti ekstrakurikuler Paskibra, Pramuka, OSIS dan Seni Bela Diri Setia Hati (SH).

Setelah itu penulis melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Penengahan pada tahun 2013 dan selesai pada tahun 2016. Selama di SMAN 1 Penengahan penulis mengikuti kegiatan ekstrakurikuler Paskibra, Pramuka, OSIS dan Seni Bela Diri Setia Hati (SH).

Kemudian setelah itu pada tahun yang sama penulis melanjutkan ke jenjang pendidikan Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan prodi Jurusan Siyasah (Hukum Tatanegara Islam) di Fakultas Syari'ah. Selama menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi penulis tergabung dalam organisasi mahasiswa.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat, taufik dan hidayah serta petunjuk dan limpahan rahmat-Nya, shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan nabi besar kita Muhammdah SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul: Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Pasca Tsunami Dalam Perspektif Fiqh Siyasah” (Studi di Desa Way Muli Timur Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan). Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan nikmat dan taufik nya dan semoga kelak kita mendapatkan syafa’at-Nya kelak di hari kiamat. Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) jurusan Siyasah (Hukum Tata Negara) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum.

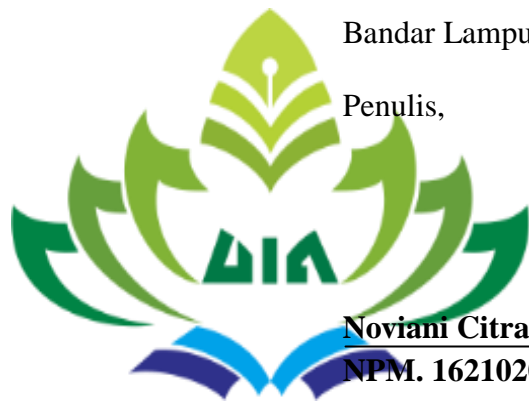
Skripsi ini sngat banyak mendapat bantuan semua pihak. Dalam proses penyelesaiannya, tidak lupa penulis haturkan terimakasih sedalam dalamnya, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu, terutama kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

2. Dr. H. Khoirudin, M.H selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
3. Frenki, M.S.I selaku Ketua Jurusan Siyasah (Hukum Tata Negara) yang senantiasa sabar dalam memberikan arahan serta selalu memotivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Dra. Firdaweri, M.H.I selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Fathul Mu'in, S.H.I., M.H.I selaku Pembimbing II yang juga banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang juga banyak memberikan ilmu, bimbingan, dan arahan kepada penulis selama menempuh pendidikan sampai dengan penyelesaian skripsi ini.
7. Drs. Zamra Ghozali selaku Kepala Desa beserta Jajaran Pemerintah Desa Way Muli Timur yang telah membantu penulis dalam penelitian skripsi ini.
8. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah banyak memberikan dukungan moril dan materil yang tak ternilai selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
9. Sahabat-sahabat Siyasah D angkatan 2016, yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Keluarga besar KKN 107 Desa Sinar Petir Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus.

11. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Semoga semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak demi kemaslahatan bersama dan bernilai ibadah dihadapan Allah SWT. *Amiin Yarabbal 'Alamiin*



Bandar Lampung, 25 Juni 2020

Penulis,

Noviani Citra Dewi

NPM. 1621020227

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	4
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Fokus Penelitian	10
E. Rumusan Masalah	10
F. Tujuan Penelitian	10
G. Signifikasi Penelitian	11
H. Metode Penelitian.....	11

BAB II LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori.....	17
1. Pemerintah Desa.....	17
a. Pengertian Pemerintah Desa	17
b. Tugas dan Kewajiban Pemerintah Desa.....	18
c. Struktur Pemerintah Desa	25
2. Ekonomi Kerakyatan.....	26
a. Pengertian Ekonomi Kerakyatan	26
b. Tujuan Ekonomi Kerakyatan.....	26
c. Prinsip Ekonomi Kerakyatan.....	27
3. Tsunami.....	28
4. Fiqh Siyasah	33
a. Pengertian Fiqh Siyasah	33
b. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah	35
c. Kedudukan Fiqh Siyasah Dalam Sistemika Hukum Islam	37
d. Peran Pemerintah Desa Dalam Fiqh Siyasah	39
B. Tinjauan Pustaka	50

BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Way Muli Timur.....	52
1. Sejarah Desa Way Muli Timur	52

2. Visi Dan Misi	54
3. Kondisi Geografis dan Demografis Desa Way Muli Timur	57
4. Struktur Pemerintah Desa Way Muli Timur	59
5. Mata Pencaharian Penduduk Desa Way Muli Timur.....	60
B. Peran Pemerintah Desa Way Muli Timur Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Pasca Tsunami	62
BAB IV ANALISIS	
A. Peran Pemerintah Desa Way Muli Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Pasca Tsunami	73
B. Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Pasca Tsunami di Desa Way Muli Timur	77
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel. 1. Luas Wilayah Desa Way Muli Timur Berdasarkan Lokasi	56
Tabel. 2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	57
Tabel. 3. Jumlah Pertumbuhan Penduduk Desa Way Muli Timur	57
Tabel. 4. Mata Pencarian Menurut Jenis Pekerjaan	62
Tabel. 5. Mata Pencarian Menurut Jenis Tanaman	63
Tabel. 6. Mata Pencarian Menurut Jenis Peternakan	63



DAFTAR GAMBAR

Gambar. 1. Letak Desa Way Muli Timur Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan	55
Gambar. 2. Korban Jiwa dan Kerusakan Akibat Tsunami	64
Gambar. 3. Rumah Huntara dan Huntap	70
Gambar. 4. Galangan Dana Peduli Lampung oleh Tim Komunitas Matic17	73



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Panduan Wawancara

Lampiran 2. Laporan Penelitian (Hasil Interview)

Lampiran 3. Surat Keterangan Wawancara

Lampiran 4. Surat Keterangan Izin Riset

Lampiran 5. Surat Rekomendasi Penelitian/Survei Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung

Lampiran 6. Surat Rekomendasi Penelitian Pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan

Lampiran 7. Blanko Konsultasi Skripsi

Lampiran 8. Gambar Riset Bersama Jajaran Aparat Pemerintah Desa di Kantor Desa Way Muli Timur Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lamsel

Lampiran 9. Gambar Kerusakan Akibat Tsunami Erupsi Gunung Anak Krakatau di Desa Way Muli Timur Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lamsel



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan informasi dan gambaran yang jelas serta memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan dalam beberapa istilah yang terkait dengan judul skripsi ini “Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Pasca Tsunami Dalam Perspektif Fiqh Siyasah”. (Studi di Desa Way Muli Timur Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan) sebagai berikut:

1. Peran Pemerintah Desa

Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan terhadap sesuatu, jika seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan telah suatu peran.¹ Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²

2. Ekonomi

Ekonomi adalah suatu studi mengenai individu-individu dan masyarakat membuat pilihan, dengan atau tanpa menggunakan uang, menggunakan sumber-sumber daya yang terbatas tetapi dapat digunakan dalam berbagai macam cara dalam menghasilkan berbagai macam jenis barang, jasa dan

¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi sebagai pengantar* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), h. 267.

² Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

mendistribusikannya untuk kebutuhan konsumsi, baik dimasa sekarang dan di masa datang, kepada berbagai individu dan golongan masyarakat.³

3. Masyarakat

Yaitu sekumpulan orang-orang yang saling berinteraksi secara kontinyu, sehingga terdapat relasi sosial yang terpola, terorganisasi.⁴

4. Tsunami

Yaitu suatu bencana alam, dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana yaitu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam, mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau factor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.⁵

5. Perspektif

Yaitu suatu cara pandang yang muncul akibat kesadaran seseorang akan sesuatu yang akan menambah wawasan atau pengetahuan seseorang agar dapat melihat segala sesuatu yang terjadi dengan pandangan yang luas.⁶

6. Fiqh Siyasah

Yaitu pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan *syara'* mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil yang *tafshili* atau

³ Sudano Sukirno, *Mikro Ekonomi: Teori Pengantar*, Ed. 3, Cet. 26 (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 9.

⁴ Soetomo, *Pemberdayaan Masyarakat*, Cet. I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Celaban Timur UH III/548, 2013), h. 25.

⁵ Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

⁶ Dedi Supriadi, *Ekonomi Mikro Islam* (Bandung: Pusaka Seti, 2013), h. 249.

hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya (al-Qur'an dan Sunnah).⁷

7. Studi di Desa Way Muli Timur

Studi adalah salah satu metode penelitian dalam suatu ilmu sosial yang dapat digunakan untuk menghasilkan dan menguji hipotesis.⁸ Desa Way Muli Timur merupakan suatu desa yang terletak di Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lamsel, yang letak geografisnya berhadapan langsung dengan Selat Sunda.

8. Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan

Kecamatan Rajabasa adalah sebuah kecamatan yang terdapat ke dalam wilayah Kabupaten Lampung Selatan merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Lampung.



B. Alasan Memilih Judul

1. Alasan Objektif

- a. Berdasarkan hasil pengamatan, bahwa setelah pasca tsunami yang terjadi pada tanggal 22 Desember 2018 di Desa Way Muli Timur Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lamsel mengakibatkan kerusakan terhadap rumah, sarana dan prasarana umum, perahu-perahu nelayan yang sebagai mata pencaharian penduduk dan sebagainya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam terhadap peran

⁷Djazuli, *Fiqh Siyash: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007), h. 27.

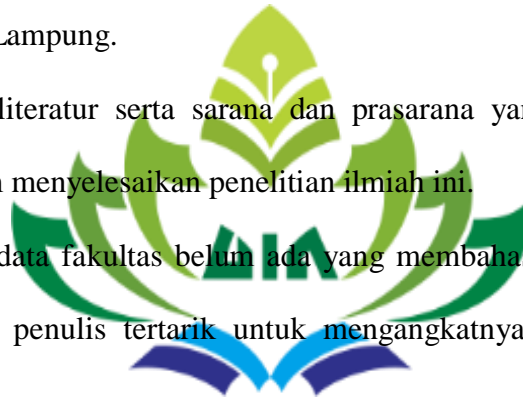
⁸ Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 153.

Pemerintah desa Kabupaten Lampung Selatan guna meningkatkan kembali ekonomi masyarakat di Desa Way Muli Timur.

- b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan *fiqh siyasah* terhadap Peran Pemerintah desa Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Pascatsunami. (Studi di Desa Way Muli Timur Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan).

2. Alasan Subjektif

- a. Permasalahan yang dipilih penulis sangat relevan dengan disiplin ilmu di Fakultas Syari'ah Jurusan Siyasah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- b. Tersedianya literatur serta sarana dan prasarana yang mendukung penulis dalam menyelesaikan penelitian ilmiah ini.
- c. Berdasarkan data fakultas belum ada yang membahas permasalahan ini, sehingga penulis tertarik untuk mengangkatnya sebagai judul skripsi.



C. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang terletak pada sabuk gunung berapi pasifik (*the ring of fire*), kondisi ini menyebabkan banyak gunung berapi di Indonesia. Gunung api adalah suatu lubang bumi, dari lubang tersebut dapat dikeluarkan suatu inti bumi berupa batuan pijar atau gas panas,

dan umumnya keduanya sering disebut magma, keluar dari dalam bumi ke permukaan.⁹

Salah satu gunung berapi di Indonesia yang masih aktif adalah Gunung Merapi Anak Krakatau yang terletak di Selat Sunda. Akibat erupsi Anak Gunung Krakatau yang terjadi pada Sabtu malam tanggal 22 Desember 2018 yang mengakibatkan tsunami yang menerjang sebagian Pulau Jawa dan Pulau Sumatera yaitu wilayah Kabupaten Lampung Selatan dan khususnya di Desa Way Muli Timur Kecamatan Rajabasa terparah terkena dampaknya.

Desa Way Muli Timur merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan. Way Muli Timur merupakan salah satu desa wisata pantai dengan mayoritas masyarakat bertempat tinggal di pinggiran pantai dengan mata pencaharian sebagai nelayan, yang telah berdiri sejak tahun 1878 dan letak geografisnya berhadapan langsung dengan Anak Gunung Krakatau.

Menurut data yang diperoleh media ini bersumber dari posko Balai Desa Way Muli Timur, dari 383 Kepala Keluarga (KK) yang tinggal di Way Muli Timur sebanyak 156 KK dengan kondisi bangunan rumahnya rusak besar dan hancur rata dengan tanah. Kemudian, korban jiwa atau meninggal dunia yang baru ditemukan sebanyak 22 jiwa dan delapan orang yang dikabarkan belum ditemukan. Sementara untuk korban selamat yang saat ini telah diungsikan ke dataran lebih tinggi di beberapa pos sebanyak 1.300 orang dari jumlah 1.479 jiwa. Menurut pantauan di lokasi, setidaknya terdapat 10 posko pengungsian

⁹ Rosalina Kumalawati, "Dampak Banjir Lahar Pascaerupsi Gunungapi Merapi 2010", Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian LPPM UMP 2014 ISBN 978-602-14930-3-8 (Purwokerto, 20 Desember 2014), h. 164.

yang tersedia. Sebagian warga setempat juga ada yang mengungsi ditempat aman di luar kampung atau desa tetangga atau keluarga yang tidak terkena tsunami.¹⁰

Akibat dari pada itu, maka dampak yang ditimbulkan dari tsunami tersebut, menyebabkan 90% masyarakat kehilangan tempat tinggal, harta benda, sekolah serta perahu-perahu nelayan yang sebagaimana digunakan nelayan melaut untuk mencari ikan rusak parah, sehingganya aktivitas dalam mata pencaharian masyarakat terputus.

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Bencana Alam, dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 menjelaskan:

“Bencana alam adalah serangkaian peristiwa yang mengancam kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis”.¹¹

Terhadap bencana alam yang terjadi di Desa Way Muli Timur khususnya, maka dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Bencana Alam bahwa pemerintah dan pemerintah desa yang menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.¹² Berkaitan dengan tanggungjawab pemerintah dalam hal penanggulangan bencana disebutkan dalam Pasal 6 yang meliputi:¹³

1. Pengurangan resiko bencana dan pemaduan pengurangan resiko bencana dengan pembangunan;
2. Perlindungan masyarakat dari dampak bencana;

¹⁰On-line, tersedia di: <https://lampungtoday.com/2018/12/25/desa-waymuli-timur-kecamatan-rajabasa-alami-kerusakan-terparah-tsunami-lamsel/>

¹¹ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Bencana Alam, Pasal 1.

¹² *Ibid.*, Pasal 5.

¹³ *Ibid.*, Pasal 6.

3. Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana serta adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum;
4. Pemulihan kondisi dampak bencana;
5. Pengalokasian anggaran untuk penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan dan belanja negara yang memadai;
6. Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai;
7. Pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.

Pemerintahan dan pembangunan di Indonesia sudah memasuki otonomi daerah yang memiliki hahikat bahwa pengelolaan pembangunan di serahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa.¹⁴ Otonomi daerah menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah desa adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah desa beserta masyarakatnya mengelola setiap sumberdaya yang ada, dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah desa dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akana merangsang perkembangan pertumbuhan ekonomi dalam suatu wilayah tersebut.¹⁵ Tujuan dari pembangunan ekonomi adalah mencapai tingkat kemakmuran yang lebih tinggi. Dalam mencapai tujuan pembangunan tersebut pemerintah dapat ikut campur secara aktif maupun secara pasif.

Pembangunan daerah merupakan bagian yaang integral dari pembangunan nasional yang tidak bisa melepaskan dari konsep otonomi daerah. Pembangunan

¹⁴ Aditya Nugraha Putra, “Analisis Potensi Ekonomi Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”, (UIN Syrif Hidayatullah Jakarta: 2013), h. 2.

¹⁵ Lincolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, Edisi 5 (Yogyakarta: Upp Stim Ykpn, 2015), h. 374.

daerah juga mencakup pembangunan ekonomi yang dilaksanakan dalam kerangka pembangunan nasional dengan prinsip kesemestaan, pembangunan harus bersifat komprehensif mencakup seluruh segi kehidupan masyarakat termasuk dalam hal kesejahteraan.

Terhadap bencana alam jika dilihat dari kaca mata hukum Islam bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi merupakan tegurandari Allah SWT. Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. Al-Syura ayat 30:

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ

Artinya: *“Dan apa saja yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu)”*.¹⁶

Bencana alam merupakan teguran yang disebabkan oleh perilaku manusia yang kufur kepada Allah atau menentang sunnatullah. Oleh karenanya, menurut Ajaran Islam manusia perlu berbenah diri dan serta kembali ke jalan Allah, agar bencana dalam konteks petaka alam dapat dihindarkan seminimal mungkin.¹⁷ Maka dalam Islam pemerintah dan rakyat dianjurkan untuk selalu taat kepada Allah SWT. Berkaitan dengan hal itu, dalam *fiqh siyasah* bahwa konsep pembangunan yang manusia harus bertujuan untuk kesejahteraan dan kemaslahatan, hal tersebut sejalan dengan tujuan *maqhasid syari'ah*. Adapun prinsip pembangunan dalam *fiqh siyasah* yang menjadi landasan pokok

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Aliyy Al-Qur'an* (Bandung: CV. Diponegoro, 2000), h.

¹⁷ Abdul Mustaqim, “Teologi Bencana Dalam Perspektif Al-Qur'an”, *Jurnal Nun*, Vol. 1 No. 1 (2015), h. 104.

meliputi tauhid, *rububyyah* (ketentuan-ketentuan Allah SWT tentang rizki, rahmat dan petunjuk-Nya untuk menyempurnakan segala pemberian-Nya itu), *Khilafah* (fungsi manusia sebagai *khalifah* Allah dimuka bumi) dan *tazkiyah* (penyucian dan pengembangan).

Tugas yang dibebankan kepada para rasul Allah adalah melakukan *tazkiyah* (penyucian) manusia dalam segala hubungan dan pergaulannya dengan Allah, dengan manusia sesamanya, dengan lingkungan alamnya, dan dengan masyarakat serta bangsa dan negaranya. Adapun *tazkiyah* merupakan upaya untuk mentransformasikan kehidupan ke arah yang lebih baik dan berkah. Konsep kerangka *tazkiyah* didasari pada tiga pokoklandasan yang harus dipegang teguh yaitu keadilan, keseimbangan dan ketundukan kepada Allah. Konsep *tazkiyah* mendorong bahwa fokus pembangunan tidak hanya diarahkan pada hal-hal yang bersifat fisik material semata, melainkan juga dikaitkan dengan aspek moral spiritual.

Berkaitan dengan 4 (empat) landasan pokok yang telah dijelaskan diatas menyatakan bahwa tujuan utama pembangunan menurut *fiqh siyasah* yaitu mengarah pada kemakmuran dan kebahagiaan baik didunia maupun diakhirat. Tujuan ini menjadi penting dengan adanya landasan *khilafah* disatu pihak, tanpa mengabaikan konsep *tazkiyah*. Keseimbangan inilah tampaknya yang ingin dicapai dan diwujudkan dalam konsep pembangunan yang bernafaskan *fiqh siyasah*.¹⁸

¹⁸ Ibnu Syarif, et. al, *Fiqh siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 31.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan diatas, mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Pemerintah desa Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Pasca Tsunami Dalam Perspektif Fiqh Siyasah”. (Studi di Desa Way Muli Timur Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan).

D. Fokus Penelitian/Batasan Masalah

1. Fokus penelitian, yaitu penelitian yang dilakukan spesifik dan sesuai dengan judul penelitian yang telah ditetapkan, maka penelitian ini terfokus kepada masalah Peran Pemerintah desa Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Pasca Tsunami Di Desa Way Muli Timur Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan.
2. Batasan masalah, yaitu penelitian ini membatasi ruang lingkup hanya dalam masalah Peran Pemerintah desa Dalam Meningkatkan Ekonomi Pasca Tsunami di Desa Way Muli Timur Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan.

E. Rumusan Masalah

1. Apa Peran Pemerintah Desa Way Muli Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Pasca Tsunami?
2. Bagaimana Perspektif Fiqh Siyasah tentang Peran Pemerintah Desa Way Muli Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Pasca Tsunami?

F. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran Pemerintah Desa Way Muli dalam meningkatkan ekonomi masyarakat pasca tsunami.

2. Untuk mengetahui perspektif Fiqh Siyasah tentang peran Pemerintah Desa Way Muli dalam meningkatkan ekonomi masyarakat pasca tsunami.

G. Signifikasi Penelitian

1. Berupa ide dan inspiratif agar mampu mengembangkan ilmu dan metode yang efektif mengenai peran pemerintah desa dalam meningkatkan kembali kualitas ekonomi yang layak bagi masyarakat di Desa Way Muli Timur Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan pasca tsunami dan kaidah-kaidah berdasarkan fiqh siyasah.
2. Penelitian ini diharapkan dapat membuka cakrawala pemikiran dan sebagai bahan sumbangan peneliti kepada akademisi maupun masyarakat, dan khususnya pembelajaran untuk pemerintah desa yang lainnya dalam meningkatkan sosial ekonomi masyarakat terhadap korban tsunami di Desa Way Muli Timur Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan.
3. Untuk memenuhi syarat wajib dalam menyelesaikan study pada Fakultas Syariah Jurusan Siyasah (Hukum Tatanegara) di Universitas Islam Negeri Lampung dengan gelar Sarjana Hukum (S.H).

H. Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan cara bagaimana suatu penelitian itu dilakukan.¹⁹ Pembahasan penelitian ini agar sesuai dengan apa yang diharapkan, dan dapat terlaksana dengan objektif dan ilmiah, serta hasil yang maksimal. Untuk itu diperlukan metode-metode penelitian untuk bertindak

¹⁹ Susiadi AS, *Metodologi Penelitian* (Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 19.

dan berfikir menurut aturan-aturan yang ilmiah. Maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field reasearch*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan.²⁰

b. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu pemecahan masalah yang diselidiki dengan manggambarkan keadaan subjek atau objek berdasarkan fakta-fakta yang terjadi pada masa sekarang. Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif difokuskan pada pendekatan makro, yang dilakukan melalui studi literatur dengan data sekunder seperti artikel ilmiah, dokumen perencanaan dan kebijakan pemerintah, serta media massa. Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep pemulihan pasca bencana tsunami secara umum dan praktik pemulihan sosial-ekonomi pasca bencana.²¹

²⁰ Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research* (Bandung: Tarsoto, 1995), h. 58.

²¹ Ramanditya Wimbardana, et. al. "Perencanaan Pemulihan Sosial-Ekonomi Masyarakat Akibat Erupsi Gunung Merapi Tahun 2010". *Jurnal Nasional Tata Lokal* (Universitas Diponegoro), h. 8.

2. Sumber Data

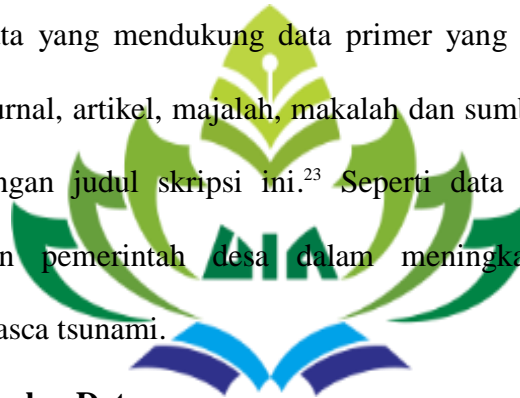
Sumber data yang penulis gunakan pada penelitian ini meliputi:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti.²² Yang berkaitan dengan data peran pemerintah desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat pasca tsunami di Way Muli Timur.

b. Data Sekunder

Adalah data yang mendukung data primer yang bersumber dari buku-buku, jurnal, artikel, majalah, makalah dan sumber-sumber lain berkaitan dengan judul skripsi ini.²³ Seperti data yang berkaitan dengan peran pemerintah desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat pasca tsunami.



3. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Yaitu usaha mengumpulkan data yang dilakukan dengan mencatat data-data yang bersumber dari arsip dokumentasi Desa Way Muli Timur dan mengamati secara sistematis gejala yang terjadi seperti, sisa-sisa reruntuhan bangunan sampai dengan peran pemerintah desa

57. ²² Mohammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h.

²³ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Bandung: Sinar Baru, 1991), h. 132.

serta usaha yang dilakukan masyarakat dalam memulihkan kembali ekonomi pasca tsunami.²⁴

b. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban jawaban responden dicatat atau direkam.²⁵ Seperti kepala desa, sekretaris desa, pamong desa, tokoh agama, dan tokoh masyarakat dan penduduk di Desa Way Muli Timur Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan.

c. Dokumentasi

Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa foto, catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah, agenda tentang pendapat, teori, dalil atau hukum dan sebagainya, yang berhubungan dengan masalah penyelidikan.²⁶

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalissasi yang terdiri atas objek-objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.²⁷

²⁴ Soeratno, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 1995), h. 99.

²⁵ Susiadi AS, *Metodologi... Ibid.*, h. 107.

²⁶ Jalaludin Rahmat, *Metodologi Penelitian Komunikasi* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), h. 83.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 4.

Dengan demikian, yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa.

b. Sampel

Sampel adalah sebagai bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.²⁸ Sampel ataupun objek dari populasi yang diambil melalui teknik sampling, yakni kepala desa, sekretaris, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan penduduk Desa Way Muli Timur.

5. Metode Pengolahan Data

Setelah peneliti memperoleh data yang cukup untuk penulisan skripsi ini, maka selanjutnya penulis akan melakukan pengolahan data dengan melakukan beberapa langkah sebagai berikut yaitu:

a. Pemeriksaan data (*editing*)

Yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan.²⁹

b. Rekonstruksi data

Yaitu metode menyusun ulang data secara teratur, berurutan dan sistematis.

²⁸ *Ibid*, h. 4.

²⁹ Susiadi, *Metodologi... Ibid.*, h. 115

c. Sistematisasi data

Yaitu metode mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klarifikasi data dan berdasarkan urutan masalah.³⁰

6. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif. Setelah keseluruhan data dikumpulkan, dan langkah selanjutnya adalah penulis menganalisis data tersebut agar dapat ditarik kesimpulan. Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode berfikir induktif yaitu berdasarkan fakta-fakta yang umum dan peristiwa yang konkrit. Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.



³⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet ke-1 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 9.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Pemerintah Desa

a. Pengertian Pemerintah Desa

Desa berasal dari bahasa sansakerta yaitu “*Deshi*” yang artinya tanah kelahiran atau tanah tumpah darah. Pengertian desa adalah unit pemusatan penduduk yang bercorak agraris dan terletak relative jauh dari kota. Menurut Undang-Undang No. 43 Tahun 2014 Tentang Desa, pengertian desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Menurut Sutarjo Kartohadikusumo, desa sebagai kesatuan hukum tempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri, di dalamnya memiliki adat istiadat tersendiri dan juga peraturan tersendiri di dalam masyarakat.²

Menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya “Otonomi Desa”, Pemerintahan Desa adalah subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur

¹ Undang-Undang No. 43 Tahun 2014 tentang Desa.n

² Ficayani, “Peran Pemerintah Desa dalam Pembangunan Pasar”. Skripsi. IAIN Raden Intan Lampung, 2017., h. 29.

dan mengurus kepentingan masyarakat desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati. Di dalam Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah Perangkat Desa atau yang biasa disebut Kepala Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.³

Pemerintah Desa atau disebut juga dengan “Pemdes” adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa. Lembaga ini diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa yang diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemimpin pemerintah desa, seperti tertuang dalam paragraf 2 Pasal 14 ayat 1 adalah Kepala Desa yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.⁴

b. Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa

Tugas dan fungsi Pemerintah desa, tidak berbeda dengan pemerintah daerah maupun pusat, yang sama-sama memberikan

³ Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁴ Kepala Desa (*On-Line*), tersedia di: https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pemerintah_Desa diakses pada 08 Oktober 2020.

pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Adapun tugas Pemerintah Desa, adalah sebagai berikut: ⁵

- 1) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945 serta mempertahankan keutuhan NKRI.
- 2) Meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- 3) Memelihara ketentaraman dan ketertiban masyarakat.
- 4) Melaksanakan kehidupan demokrasi.
- 5) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- 6) Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa.
- 7) Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan.
- 8) Menyelenggarakan administrasi pemerintahan yang baik.
- 9) Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa.
- 10) Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa.
- 11) Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa.
- 12) Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa.
- 13) Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat.
- 14) Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa.

⁵ Sugiman, "Pemerintah Desa". *Binamulia Hukum*, Vol. 7, No. 1, (Juli, 2018), h.84.

- 15) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Sedangkan fungsi Pemerintah Desa, adalah sebagai berikut:⁶

- 1) Fungsi Kepala Desa, Kepala Desa berkedudukan sebagai kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan ke- masyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Merujuk pada Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa, untuk melaksanakan tugasnya, kepala desa memiliki fungsi sebagai berikut:
- a) Menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembina ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan, dan pengelolaan wilayah;
 - b) Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan dan pembangunan bidang pendidikan kesehatan;
 - c) Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya

⁶ *Ibid*, h. 85.

masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;

- d) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna; dan
- e) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

2) Fungsi Sekretaris Desa, Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa. Sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa, sekretaris desa mempunyai fungsi:

- a) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
- b) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
- c) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber- sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi

keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya; dan

d) Melaksanakan urusan perencanaan, seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

3) Fungsi Kepala Urusan, Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat dan kepala urusan bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Selanjutnya, untuk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi, penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
- b) Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan, seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber

pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya; dan

c) Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan, seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data- data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

4) Fungsi kepala seksi, kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis. Kepala seksi bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Untuk melaksanakan tugas kepala seksi mempunyai fungsi:

- a) Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil desa;
- b) Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana pedesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik,

lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna;

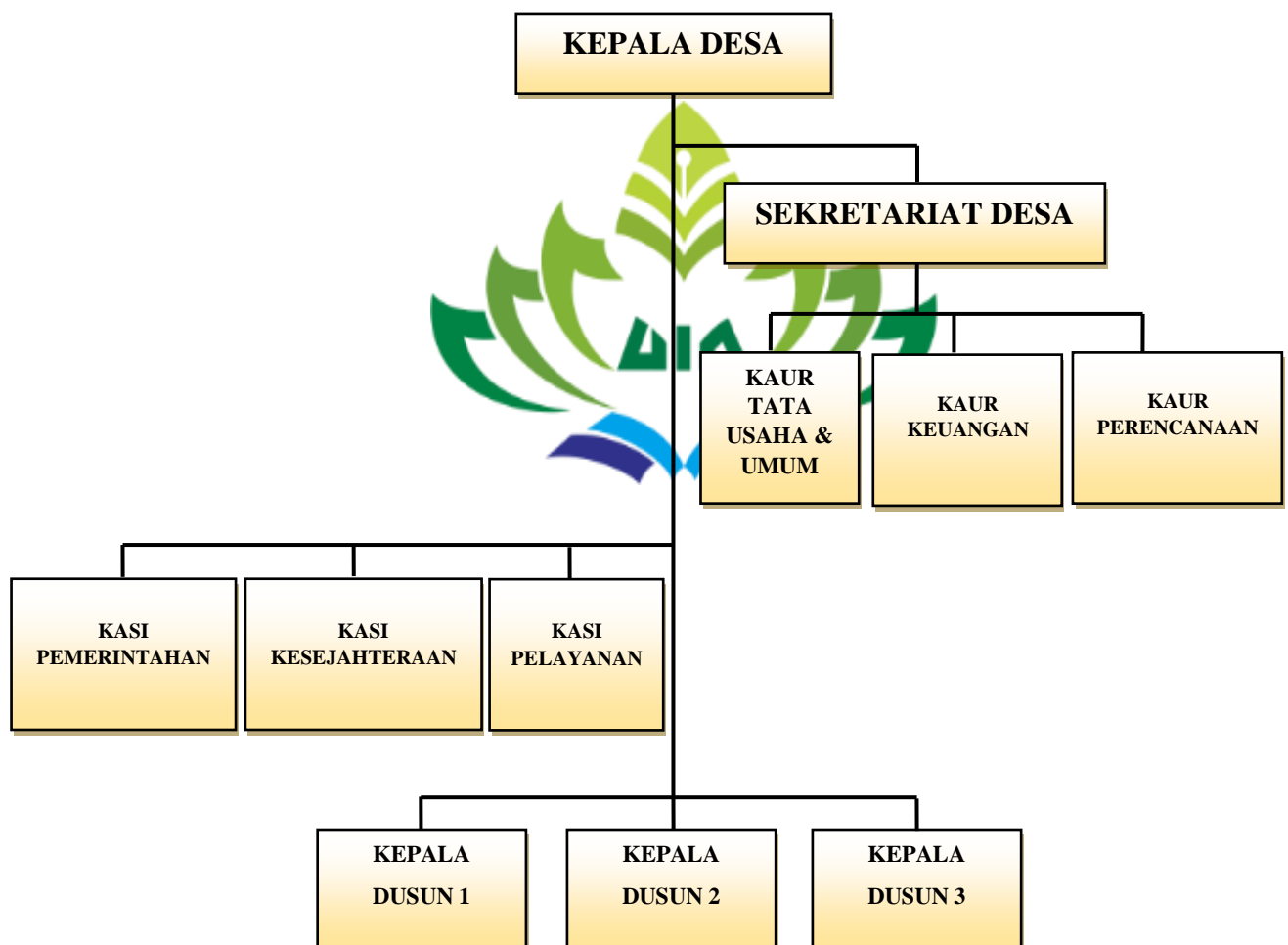
c) Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

5) Fungsi Kepala Kewilayahan, kepala kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut, kepala kewilayahan/kepala dusun memiliki fungsi:

- a) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, serta penataan dan pengelolaan wilayah;
- b) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
- c) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya; dan
- d) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

c. Struktur Pemerintahan Desa

Struktur organisasi sangat penting dalam pemerintahan desa agar terciptanya pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu, sangat penting susunan organisasi desa harus dibuat secara teratur agar dapat berfungsi dengan baik. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa mengacu kepada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.⁷



Gambar 2.1.
Struktur Pemerintahan Desa

⁷ Ficayani, "Peran Pemerintah Desa dalam Pembangunan Pasar". Skripsi. IAIN Raden Intan Lampung, 2017., h. 29.

2. Ekonomi Kerakyatan

a. Pengertian Ekonomi Kerakyatan

Ekonomi kerakyatan adalah sistem perekonomian yang di mana pelaksanaan kegiatan, pengawasannya dan hasil dari kegiatan ekonomi dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat.

Menurut Sarbini Sumawinata, pengertian ekonomi kerakyatan adalah gagasan tentang cara, sifat dan tujuan pembangunan dengan sasaran utama perbaikan nasib rakyat yang pada umumnya bermukim di pedesaan.⁸

Ekonomi kerakyatan juga bisa diartikan sebagai suatu sistem perekonomian yang dibangun pada kekuatan ekonomi rakyat, ekonomi kerakyatan yaitu kegiatan dari ekonomi yang dapat memberikan kesempatan yang luas bagi seluruh masyarakat dalam berpartisipasi sehingga perekonomian dapat terlaksana dan berkembang secara baik.

b. Tujuan Ekonomi Kerakyatan

Tujuan yang akan dicapai dari penguatan ekonomi kerakyatan adalah untuk melaksanakan amanat konstitusi, khususnya mengenai:⁹

- 1) Perwujudan tata ekonomi yang disusun sebagai usaha bersama yang berasaskan kekeluargaan yang menjamin keadilan dan

⁸ Sarbini Sumawinata, *Politik Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), h. 161.

⁹ Fifi Hasmawati, *Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal*. *Jurnal Pengembangan Masyarakat*. Vol. 5, No. 5 Tahun 2018, h. 58.

kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 ayat 1.

- 2) Perwujudan konsep Trisakti, yaitu berdikari di bidang ekonomi, berdaulat di bidang politik dan berkepribadian di bidang kebudayaan.
- 3) Perwujudan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup rakyat banyak dikuasi negara, tercantum pada UUD 1945 Pasal 33 ayat 2.
- 4) Perwujudan amanat bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, tercantum pada UUD 1945 Pasal 27 ayat 2.

Sedangkan untuk pencapaian tujuan khusus, yaitu adalah sebagai berikut:¹⁰

- 1) Membangun Indonesia yang berdikari secara ekonomi, berdaulat secara politik dan berkepribadian yang berkebudayaan.
- 2) Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.
- 3) Mendorong pemerataan pendapatan rakyat.
- 4) Meningkatkan efesiensi perekonomian secara nasional.

c. Prinsip-prinsip Ekonomi Kerakyatan

Secara khusus dalam dunia perekonomian, konsep ekonomi kerakyatan sudah lama dikembangkan oleh Muhammad Hatta sejak

¹⁰ *Ibid*, h. 59.

tahun 1930 yang dirumuskan ke dalam konstitusi Pasal 33 UUD 1945.

Secara umum ada tiga dasar prinsip ekonomi kerakyatan adalah sebagai berikut:¹¹

- 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.
- 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- 3) Bumi, air dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

3. Tsunami

Tsunami berasal dari bahasa Jepang yang berarti gelombang ombak lautan “*tsu*” berarti lautan, “*nami*” berarti gelombang ombak. Tsunami adalah serangkaian gelombang ombak laut raksasa yang timbul karena adanya pergeseran di dasar laut akibat gempa bumi.¹² Menurut Bakornas PB2007, tsunami dapat diartikan sebagai gelombang laut dengan periode panjang yang ditimbulkan karena gangguan impulsif dari dasar laut. Gangguan *impulsive* tersebut bisa berupa gempa bumi tektonik, erupsi vulkanik atau longsoran.

Tsunami adalah sebuah ombak yang terjadi setelah sebuah gempa bumi, gempa laut, gunung berapi meletus, atau hantaman meteor di laut.

¹¹ *Ibid*, h. 60.

¹² Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 tahun 2011.

Tsunami tidak terlihat saat masih berada jauh ditengah laut, namun ketika mencapai wilayah dangkal, gelombangnya yang bergerak cepat ini akan semakin membesar. Apabila gelombang menghampiri pantai ketinggiannya meningkat sedangkan kelajuannya menurun. Gelombang tersebut bergerak pada kelajuan tinggi, hampir tidak dirasakan efeknya oleh kapal laut (misalnya) saat melintasi dilaut dalam, tetapi meningkat ketinggian hingga mencapai 30 meter atau lebih di daerah pantai.¹³

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Bencana Alam di definisikan sebagai rangkaian peristiwa yang mengancam/mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan faktor non-alam maupun faktor manusia yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.¹⁴

Bencana dapat terjadi karena ada dua kondisi yaitu adanya peristiwa atau gangguan yang mengancam dan merusak (*hazard*) dan kerentanan (*vulnerability*) masyarakat. Hubungan keduanya dapat digambarkan bila gangguan atau ancaman tersebut muncul kepermukaan tetapi masyarakat tidak rentan, maka berarti masyarakat dapat mengatasi sendiri peristiwa yang mengganggu tersebut, sementara bila kondisi masyarakat rentan tetapi tidak terjadi peristiwa yang mengancam maka tidak akan terjadi bencana. Adapun bencana dibagi ke dalam tiga kategori yaitu:¹⁵

¹³ Nanin Trianawati Sugito, ST., MT, "*Tsunami*", Jurusan Pendidikan Geografi, Universitas Pendidikan Indonesia (2008), h. 2-3.

¹⁴ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Bencana Alam.

¹⁵ *Ibid.*,

- a. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, angin topan, dan tanah longsor.
- b. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
- c. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa-peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

Adapun mekanisme tsunami akibat gempa bumi dapat diuraikan dalam 4 tahap yaitu:

- a. Kondisi Awal

Yaitu dimana peristiwa gempa bumi biasanya berhubungan dengan guncangan permukaan yang terjadi sebagai akibat perambatan gelombang elastik (*elastic waves*) melewati batuan dasar ke permukaan tanah. Pada daerah yang berdekatan dengan sumber-sumber gempa laut (patahan), dasar lautan sebagian akan terangkat (*uplifted*) secara permanen dan sebagian lagi turun ke bawah, sehingga mendorong kolom air naik dan turun.

- b. Pemisahan Gelombang

Setelah beberapa menit kejadian gempa bumi, gelombang awal tsunami akan terpisah menjadi tsunami yang merambat ke samudera yang disebut sebagai tsunami berjarak (*distant tsunami*),

dan sebagian lagi merambat ke pantai-pantai berdekatan yang disebut sebagai tsunami lokal. Tinggi gelombang di atas muka air laut rata-rata dari ke dua gelombang tsunami, yang merambat dengan arah berlawanan, besarnya setengah tinggi gelombang tsunami awal.

c. Amplifikasi

Tsunami lokal merambat melewati lereng kontinental, sering juga terjadi hal-hal seperti peningkatan amplitudo gelombang dan penurunan panjang gelombang. Setelah mendekati daratan dengan lereng yang lebih tegak, akan terjadi rayapan gelombang.

d. Rayapan

Pada saat gelombang tsunami merambat dari perairan dalam, akan melewati bagian lereng kontinental sampai mendekati bagian pantai dan terjadi rayapan tsunami.¹⁶ Rayapan tsunami adalah ukuran tinggi air di pantai terhadap muka air laut rata-rata yang digunakan sebagai acuan. Tsunami dapat dipicu oleh bermacam-macam gangguan berskala besar terhadap air laut, seperti gempa bumi, pergeseran lempeng, meletusnya gunung berapi, tumbukan benda langit. Penyebab terjadinya tsunami sebagai berikut:¹⁶

a. Longsoran Lempeng Bawah Laut (*Undersea Landslides*)

Gerakan yang besar pada kerak bumi biasanya terjadi di perbatasan antar lempeng tektonik. Celah retakan antara

¹⁶ Nanin Trianawati Sugito, ST., MT, "*Tsunami...*, *Ibid.*, h. 7-11.

kedua lempeng tektonik ini disebut dengan sesarm, seperti sekeliling tepian Samudra Pasifik yang biasa disebut dengan lingkaran Api, lempeng samudra yang lebih padat menunjam masuk ke bawah lempeng benua. Proses ini disebut dengan penunjaman. Gempa subduksi sangat efektif membangkitkan gelombang tsunami.

b. Gempa Bawah Laut (*Undersea Earthquake*)

Peristiwa gempa tektonik adalah gempa yang diakibatkan oleh pergerakan lempeng bumi. Gempa semacam ini terjadi dibawah laut, air diatas wilayah lempeng yang kemudian bergerak tersebut akan berpindah dari posisi ekuilibriumnya. Gelombang tersebut muncul ketika air ini bergerak oleh pengaruh gravitasi kembali ke posisi ekuilibriumnya. Apabila wilayah yang luas pada dasar laut bergerak naik ataupun turun, tsunami dapat terjadi.

c. Aktivitas Vulkanik (*Volcanic Activities*)

Akibat pergerakan lempeng yang terjadi didasar laut, selain dapat menyebabkan gempa, dapat menyebabkan peningkatan aktivitas vulkanik pada gunung berapi. Kedua hal ini dapat menggoncangkan air laut di atas lempeng. Hal demikian juga dapat terjadi ketika meletusnya gunung berapi yang terletak pada dasar samudera yang kemudian dapat menaikkan air dan membangkitkan gelombang tsunami.

d. Tumbukan Benda Luar Angkasa (*Cosmic-body Impacts*)

Peristiwa tumbukan dari benda luar angkasa seperti meteor merupakan gangguan terhadap air laut yang datang dari arah permukaan. Tsunami yang timbul karena sebab ini umumnya terjadi cepat dan jarang mempengaruhi wilayah pesisir yang jauh dari sumber gelombang.

4. Fiqh Siyasah

a. Pengertian Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah merupakan ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya, dan negara khususnya. Yang berupa penetapan hukum, pengaturan, kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh manusia dan menghindari dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa yang dijalani suatu bangsa.¹⁷

Kata *fiqh* berasal dari kata *faqaha-yaqahu-fiqhan*. Secara bahasa pengertian *fiqh* adalah “paham yang mendalam”. Menurut Imam al-Tirmidzi seperti dikutip Amir Syarifuddin menyebut “*fiqh* tentang sesuatu” berarti mengetahui batilnya sampai kepada ke dalamannya. Kata “*faqaha*” diungkap dalam al-Qur’an sebanyak 20 kali. 19 kali

¹⁷ Mujaer Ibnu Syarif dan Khamami Zana, *Fiqh Siyasah, dan pemikiran politik Islam* (Jakarta: Erlangga 2008), h. 2-15.

diantaranya digunakan untuk pengertian “kedalaman Ilmu yang dapat diambil manfaat darinya”.

Sedangkan menurut istilah *fiqh* adalah ilmu atau pemahaman tentang hukum hukum *syariat* yang bersifat *amaliyah*, yang digali dari dalil-dalinya yang rinci (*tafsili*). Menurut Ulama *Syara' fiqh* secara terminologis yaitu pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan *syara'* mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil yang *tafshili* atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya. Jadi *fiqh* adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan sunnah.¹⁸

Kata *fiqh* mempunyai arti paham atau memahami didukung oleh firman Allah SWT:

قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا
وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ

Artinya: “Mereka berkata, hai Syu'aib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu dan sesungguhnya kami benar-benar melihat kamu seorang yang lemah di antara kami; kalau tidaklah karena keluargamu tentulah kami telah merajam kamu, sedang kamupun bukanlah seorang yang berwibawa di sisi kami”. (Q.S. Hud ayat 91).¹⁹

Sedangkan kata “*siyasah*” berasal dari kata *sasa* yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintahkan. Pengertian kebahasaan ini bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur, mengurus dan membuat

¹⁸ Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007), h. 27.

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Aliyy Al-Qur'an* (Bandung: CV. Diponegoro, 2000), h. 185.

kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu. Adapun pengertian secara terminologis *siyasah*, menurut Abu al-Wafa Ibn Aqil *siyasah* adalah suatu tindakan yang dapat mengantar rakyat lebih dekat kepada *kemaslahatan* dan lebih jauh dari kerusakan, kendati pun Rasulullah tidak menetapkannya dan Allah SWT juga tidak menurunkan wahyu untuk mengaturnya.²⁰

Menurut Abdul Wahaf Khallaf, dijelaskan bahwa *siyasah* adalah pengaturan perundangan-undangan yang dibuat untuk memelihara ketertiban, *kemaslahatan* dan mengatur keadaan.

Sementara Louis Ma'luf, *siyasah* yaitu membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka kejalan keselamatan. Adapun menurut Ibn Manzhur *siyasah* adalah mengatur dan memimpin sesuatu yang pada tujuannya mengantarkan kepada kemaslahatan.²¹

b. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh* menetapkan kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* menjadi beberapa bidang *siyasah* dan ada juga yang menetapkan ke dalam 5 bidang.

Berkaitan dengan maka ruang lingkup kajian *siyasah syari'iyah* timbul beberapa persoalan. Persoalan tersebut dapat diperluas seluas ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* itu sendiri. Luasnya objek kajian

²⁰ Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Damascus: Dar al-Qalam, 2007), h. 45.

²¹ *Ibid.*, h. 46.

maka dalam tahap perkembangan *fiqh siyasah* dewasa ini, dikenal beberapa pembedaan yang diajukan oleh beberapa ahli. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy membaginya ke dalam 8 bidang²², yaitu:

1. Politik pembuatan perundang-undangan.
2. Politik hukum.
3. Politik peradilan.
4. Politik moneter/ekonomi.
5. Politik hubungan internasional.
6. Politik administrasi.
7. Politik peperangan.
8. Politik pelaksanaan perundang-undangan.

Menurut al mawardi, ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* mencakup:

1. Kebijakan pemerintah atas peraturan perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyah*).
2. Ekonomi dan militer (*Siyasah Maliyah*)
3. Peradilan (*Siyasah Sadha'iyah*)
4. Hukum perang (*Siyasah Harbiah*).
5. Administrasi negara (*Siyasah Idariyah*).

Sedangkan menurut Ibn Taimiyah merumuskan menjadi 4 bidang kajian yaitu:

1. Peradilan.
2. Administrasi negara.

²² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet Ke-1 (Jakarta: Prenada Media, 2014), h. 14.

3. Moneter
4. Serta hubungan internasional.

Sementara menurut Abdul Wahhab Khallaf menjadi 3 bidang kajian saja yaitu:

1. Peradilan.
2. Hubungan internasional.
3. Dan keuangan negara

c. Kedudukan Fiqh Siyasah dalam Sistematisasi Hukum Islam

Sebelum membahas kedudukan *fiqh siyasah* dalam sistematisasi hukum Islam, terlebih dahulu perlu dipaparkan pembagian hukum Islam (*fiqh*) secara sistematis yang akan dapat diketahui kedudukan dan urgensi *fiqh siyasah* dalam sistematisasi hukum Islam itu. Secara global hukum Islam dapat dibagi dalam dua bagian pokok²³, yaitu:

1. *Fiqh Ibadah*

Hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya.

Bagian dari *fiqh Ibadah* adalah shalat, puasa, zakat dan haji.

2. *Fiqh Mu'amalat*

Hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia dengan masalah keduniaan secara umum. Bagian dari ini adalah secara khusus berkaitan dengan persoalan-persoalan ekonomi seperti jual beli, perjanjian, hutang piutang, *jinayah* (pidana) dan hukum perkawinan (*munakahat*).

²³ *Ibid.*, 9.

Menurut T.M Hasbi ash-Shiddieqy membagi hukum Islam secara sistematis menjadi enam bagian utama yaitu:²⁴

1. Berkaitan dengan masalah ibadah kepada Allah seperti shalat, zakat, dan haji.
2. Berkaitan dengan keluarga, seperti nikah, talak, dan rujuk.
3. Berkaitan dengan perbuatan manusia dalam hubungan sesama mereka dalam bidang kebendaan seperti jual beli dan sewa-menyewa.
4. Berkaitan dengan perangdamai dan jihad (*siyar*).
5. Berkaitan dengan hukum acara di peradilan(*munafa'ah*).
6. Berkaitan dengan akhlak (adab).

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa *fiqh siyasah* memegang peranan kedudukan penting dalam penerapan dan aktualisasi hukum Islam bisa berlaku secara efektif dalam masyarakat Islam. Tanpa pemerintahan, ketentuan hukum Islam akan menjadi sulit sekali terjamin keberlakuannya, barangkali untuk masalah ibadah tidak terlalu banyak campur tangan *siyasah*, tetapi untuk urusan-urusan kemasyarakatan yang kompleks, umat Islam membutuhkan *siyasah*.

Dengan demikian, dapat disimpulkan *fiqh siyasah* mempunyai kedudukan penting dan posisi yang strategis dalam masyarakat. Dalam hal memikirkan, merumuskan, dan menetapkan kebijakan

²⁴*Ibid.*, 50.

politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat, dan warga lain pada umumnya, pemerintah jelas memerlukan *siyasah syar'iyah*. Karenanya tanpa kebijakan politik pemerintah yang baik, sangat memungkinkan umat Islam akan sulit mengembangkan potensi yang mereka miliki.²⁵

d. Peran Pemerintah Daerah Dalam Fiqh Siyasah

Sistem pemerintahan dalam pandangan *fiqh siyasah* menurut Al-Mawardi berdasarkan teori politiknya atas dasar kenyataan yang ada dan kemudian secara realistik menawarkan saran-saran perbaikan atau reformasi. Konsep *imamah* yang dimaksud oleh Al-Mawardi dengan *imamah* adalah *khalifah*, raja, sultan atau kepala negara. *Imamah* menurut bahasa yang berarti kepemimpinan.

Imamah juga disebut sebagai *khalifah* yaitu pemimpin tertinggi rakyat. Kata imam juga digunakan untuk orang yang mengatur kemaslahatan sesuatu, untuk pemimpin pasukan, dan untuk orang dengan fungsi lainnya.²⁶ Kata *imamah* dalam al-Qur'an secara jelas tidak disebutkan yang ada hanya kata pemimpin sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Anbiya ayat 73:

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ
الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ

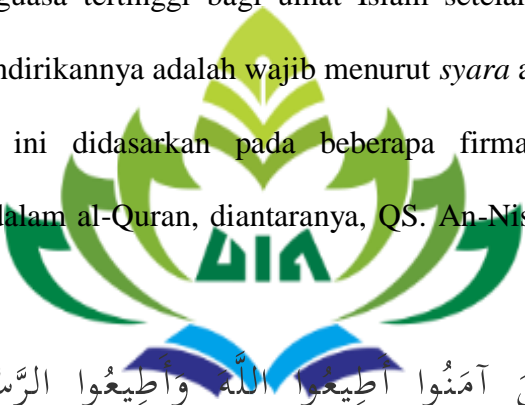
Artinya: “Kami Telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami

²⁵ *Ibid.*, 12.

²⁶ Ali Ahmad as-Salus, *Aqidah al-Imamah 'Inda as-Syi'ah Al-Isna Asyariyah*, Tjmh (Jakarta: Gema Insani Prees, 1997), h. 15-23.

*dan telah Kami wahyukan kepada, mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah”.*²⁷

Imamah merupakan jabatan politis keagamaan, imam adalah pengganti (*khalifah*) Nabi Muhammad yang bertugas menegakkan agama dan mengatur politik umat Islam. Dengan demikian, seorang imam di satu pihak yaitu pemimpin agama dan dipihak lain sebagai pemimpin politik. Menurut Syekh Abu Zahrah mengatakan bahwa *imamah* itu berarti juga *khalifah*, sebab orang yang menjadi *khalifah* adalah penguasa tertinggi bagi umat Islam setelah Nabi wafat.²⁸ Hukum mendirikannya adalah wajib menurut *syara* atas dasar *ijma*’. Pandangan ini didasarkan pada beberapa firman Allah yang tercantum dalam al-Quran, diantaranya, QS. An-Nisa ayat 59 yang berbunyi:



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي
الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ
وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan Rasul dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (sunahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik”.²⁹

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Aliyy Al-Qur'an... Ibid.*, h. 328.

²⁸ Ali Ahmad as-Salus, *Aqidah al-Imamah...Ibid.*, h. 16.

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Aliyy Al-Qur'an... Ibid.*, h. 87.

Sedangkan dasar-dasar atau pokok-pokok *imamah*, Al-Mawardi juga merujuk pada al-Quran dan as-Sunnah an-Nabawiyah, yaitu majelis *syuro* (pemufakatan) dan *baiat* (persetujuan umat). Sebagai realisasi telah dilakukan pemilihan atas pengangkatan Abu Bakar sebagai *khalifah* atas dasar pemufakatan (*syuro*) para pemuka Ansar dan Muhajirin, yang berlangsung dalam sidang *saqifah*/bagsal Bani Sa'idah di Madinah pengangkatan itu kemudian mendapat persetujuan dan pengakuan umat (*baiat*).³⁰

Dalam *fiqh siyasah* terdapat 4 unsur yang harus dipenuhi dalam kepemimpinan Islam selain dari berpegang teguh dengan landasan hukum Islam al-Quran dan Hadis, yaitu:³¹

1. Kedaulatan tertinggi ditangan Allah SWT

Hanya ditunjukan kepada Allah semata-mata dan semua umat-Nya wajib mengikuti aturan-Nya. Ketaatan kepada Allah merupakan ketaatan pokok, kemudian ketaatan kepada Rasul-Nya dan ketaatan kepada *ulil amri* diantara orang-orang yang beriman, selama *ulil amri* tidak memerintahkan maksiat kepada Allah. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nissa ayat 59:

³⁰ Rahmawati, "Sistem Pemerintahan Islam menurut Al-Mawardi dan Aplikasinya di Indonesia". *Jurnal Syari'ah dan Hukum*, Vol 16 No. 2 (Desember 2018), h. 264-283.

³¹ *Ibid.*,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ
وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى
اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman. Taatilah Allah dan Rasul, dan ulil amridi antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul (Sunahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik”.³²

Menurut Nazwar Syamsu *ulil al-Amri* dijelaskan sebagai *functionaries* yaitu orang yang mengemban tugas, atau disertai menjalankan fungsi tertentu dalam suatu organisasi. Konsep *ulil al-Amri* adalah keberagaman pengertian yang terkandung dalam kata *amr*. Kata *amr* bisa diterjemahkan dengan perintah (perintah tuhan), urusan manusia atau tuhan, perkara sesuatu, keputusan (oleh tuhan manusia), kepastian (ditentukan oleh tuhan), bahkan juga bisa diartikan sebagai tugas, misi, kewajiban dan kepemimpinan.³³

2. Prinsip keadilan

Prinsip keadilan antara manusia adalah bahwasanya semua rakyat memiliki persamaan hak di depan aturan Allah yang

³² Departemen Agama RI, *Al-Aliyy Al-Qur'an... Ibid.*, h. 87.

³³ Muhammad Harfin Zuhri, Ma, “ Konsep Kepemimpinan dalam Perspektif Islam”. *Jurnal Hukum*, Vol 19 No.01 (Januari-Juni 2014), h. 43.

harus dilaksanakan oleh mereka semuanya. Disebutkan dalam al-Quran surat an-Nissa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “*Sungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baiknya yang memberi pengajaran padamu. Sungguh Allah maha mendengar dan Maha Melihat*”.³⁴

Setiap keberadaan hukum yang mana tidak lepas dari tujuan dan harapan subjek hukum. Harapan manusia terhadap hukum pada umumnya meliputi harapan keamanan dan ketentaraman hidup. Oleh sebab itu manusia mengharapkan hal-hal di bawah ini, diantaranya:

- a. Kemaslahatan hidup bagi diri dan orang lain;
- b. Tegaknya keadilan;
- c. Persamaan hak dan kewajiban dalam hukum.
- d. Saling menjaga keamanan, sehingga mencapai tegaknya hukum dapat diwujudkan oleh masyarakat sendiri.
- e. Kebebasan berekspresi, berpendapat, bertindak dengan tidak melebihi batas-batas hukum dan norma sosial.

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Aliyy Al-Qur'an... Ibid.*, h. 87.

- f. Regenerasi sosial yang bersifat positif dan bertanggung jawab terhadap masa depan bagi kehidupan sosial dan kehidupan berbangsa serta bernegara.

3. Prinsip persamaan

Bahwa setiap warga negara memiliki persamaan hak-hak yang sama. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah al-Qur'an surat al-Hujurat ayat 10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: “Sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara sebab itu damaikanlah antara kedua saudaramu itu dan takutlah kepada Allah, supaya kamu mendapat rahmat”.³⁵

4. Prinsip Musyawarah

Prinsip musyawarah bagi para pemimpin negara dan para penguasa, masyarakat yang merupakan tolak ukur atas dari pada pelaksanaannya terhadap sikap saling menghargai dan saling menghargai pendapat. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam al-Quran surat Ash-Shuraa ayat 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Artinya: “Dan bagi orang-orang yang menerima seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah diantara

³⁵ Ibid., h. 516.

*mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka”.*³⁶

Dengan sikap musyawarah, kepentingan yang berbeda diarahkan kepada salah satu tujuan yang universal, hanya saja strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan bisa beragam, sehingga musyawarah ingin menjadikan perbedaan yang ada tersebut sebagai dinamika dan energi yang besar untuk mencapai persepsi dan tujuan yang telah disamakan. Selain prinsip musyawarah ini, ada beberapa prinsip pemerintahan yang didasarkan pada asas dan kaidah-kaidah hukum Islam.

Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip kekuasaan sebagai amanah
- b. Prinsip pengakuan dan perlindungan HAM Prinsip ini secara tegas dijelaskan dalam al-Quran antara lain surah Al-Isro ayat 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ
وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ
مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya: “Dan sesungguhnya Kami telah memuliyakan anak Adam, Kami tebarkan mereka di darat dan di laut serta Kami anugerahi mereka rezeki yang baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”.³⁷

³⁶*Ibid.*, h. 487.

³⁷*Ibid.*, h. 289.

Ayat diatas menjelaskan tentang kemuliaan manusia, yang mencakup kemuliaan pribadi, masyarakat maupun kemuliaan politik. Dalam Islam HAM bukan hanya diakui, tetapi juga dilindungi sepenuhnya, karena itu dalam hubungan ini ada 3 (tiga) prinsip terhadap hak-hak tersebut dalam Islam ditekankan pada tiga hal yaitu:

- a. Persamaan manusia;
- b. Martabat manusia, dan
- c. Kebebasan manusia.

Dalam persamaan manusia al-Quran yang merupakan pedoman dalam kehidupan sehari-hari bagi umat Islam sangat menentang dan menolak setiap bentuk perlakuan dan sikap yang mungkin dapat menghancurkan prinsip persamaan, seperti diskriminasi segala bidang, *feodalisme*, kolonialisme dan lain sebagainya. Martabat manusia berkaitan erat dengan *karamah* atau kemuliaan yang dikaruniakan Allah kepada manusia.

Salah satu kemuliaan yang diberikan Allah SWT kepada manusia diantaranya kemampuan untuk berfikir dengan menggunakan akal. Dalam ajaran Islam, manusia diberikan kebebasan, minimal ada 5 kebebasan yang dapat dianggap sebagai hak-hak dasar manusia, yaitu:

- a. Kebebasan beragama;
- b. Kebebasan berfikir dan menyatakan pendapat;
- c. Kebebasan untuk memiliki harta benda;
- d. Kebebasan untuk berusaha dan memilih pekerjaan;
- e. Kebebasan untuk memilih tempat kediaman.

5. Prinsip peradilan bebas

Dalam ajaran Islam seseorang hakim memiliki kewenangan yang bebas dalam setiap putusan yang diambil dan bebas dari pengaruh siapapun. Hakim wajib menerapkan prinsip keadilan dan persamaan terhadap siapapun. Sebagaimana Allah telah menjelaskan dalam al-Quran surat an-Nisa ayat 57:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا

Artinya: *“Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan yang saleh, kelak akan kami masukan mereka ke dalam syurga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai;kekal mereka di dalamnya; mereka di dalamnya mempunyai istri-istri yang suci, dan kami masukan mereka ke tempat-tempat yang teduh dan nyaman”*.³⁸

Prinsip peradilan bebas dalam Islam bukan hanya sekedar ciri bagi suatu negara hukum, tetapi ia juga merupakan suatu kewajiban setiap hakim. Selanjutnya terhadap peradilan bebas merupakan persyaratan bagi tegaknya prinsip keadilan dan

³⁸ *Ibid.*, h. 87.

persamaan hukum. Dalam Islam ditetapkan bahwa seorang hakim memiliki kedudukan yang bebas dari pengaruh pihak lain. Dalam menentukan menetapkan suatu putusannya hakim memiliki suatu kewenangan untuk melakukan ijtihad dalam menegakkan hukum.

6. Prinsip perdamaian

Salah satu ajaran pokok yang dibawa Rasulullah melalui ajaran Islam, ialah mewujudkan perdamaian untuk seluruh manusia dibumi. Al-Quran dengan tegas menyeru agar masuk ke dalam perdamaian, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 208:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: “*Kitab al-Quran ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa*”.³⁹

7. Prinsip kesejahteraan

Prinsip kesejahteraan dalam Islam bertujuan mewujudkan keadilan sosial dan keadilan ekonomi bagi seluruh anggota masyarakat, yang dibebankan kepada penyelenggara negara dan masyarakat. Bahwa keadilan sosial dalam ajaran Islam bukan hanya sekedar untuk pemenuhan kebutuhan materil, akan tetapi mencakup kebutuhan spritual.

³⁹ *Ibid.*, h. 32.

8. Prinsip ketaatan rakyat

Hubungan antara pemerintah dengan rakyat, ditegaskan di dalam al-Quran surat an-Nisa ayat 5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”.⁴⁰

Prinsip ketaatan mengandung makna bahwa seluruh rakyat tanpa terkecuali berkewajiban mentaati perintah pemimpin, selama pemerintah tidak zalim. Apabila dalam mengambil keputusan penguasa yang keliru dan tidak mau menyadari kekeliruannya maka rakyat tidak wajib menaatinya perintah dan penguasa seperti itu harus segera mengundurkan diri dan dihentikan dari jabatannya.⁴¹

Selanjutnya terhadap peran dan tanggung jawab pemimpin dalam *fiqh siyasah* menurut Imam Al-Mawardi, sesungguhnya pemimpin itu untuk mengambil peran kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia, pemberian pejabat *imamah* kepada

⁴⁰ *Ibid.*, h. 77.

⁴¹ On-Line, tersedia di: <https://scholar.google.co.id/citations>, Zuhairi, “kontribusi nomokrasi Islam (Rule of Islamic law) terhadap negara hukum pancasila”. Al-Adalah Jurnal Hukum Islam, Vol xII No. 1 (juni 2014), h. 175-180.

orang yang mampu menjalankan tugas di atas pada umat adalah wajib hukumnya berdasarkan *ijma* kendati *al-Ahkam* menyimpang dari mereka, dan apakah kewajiban pengangkatan pemimpin negara itu berdasarkan akal atas *syariat*, pengangkatan pemimpin Negara hukumnya wajib berdasarkan akal dan *syariat*. Secara teoritis dan idealis, Islam tidak hanya menuntut seorang pemimpin terhadap bawahannya, memiliki akhlak yang baik dan sifat dasar seorang pemimpin.

B. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dilakukan, idealnya agar penelitian mengetahui hal-hal apa yang telah diteliti dan yang belum diteliti. Sekalipun penelitian telah terjadi di lokasi tersebut, namun harus ada perbedaan dari penelitian yang telah dilakukan. Terdapat beberapa hasil penelitian yang peneliti temukan terkait dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Skripsi berjudul “Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam”. (Studi pada BUMDes Bangun Jejama Desa Margodadi Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan), oleh Rumaini Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Jenis penelitian ini *field reseach* dan bersifat deskriptif dengan batasan masalah yaitu pada Badan Usaha Milik Desa Bangun Jejama di Desa Margodadi Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

Pemerintah Desa dalam pengelolaan BUMDes Bangun Jejama cukup berperan dalam hal pendirian dan perencanaan unit usaha tetapi dari segi penasehat dan pengawasan kinerja BUMDes, Pemerintah Desa Margodadi belum berperan sepenuhnya dalam pengelolaan BUMDes Bangun Jejama.

2. Skripsi yang berjudul “Efektivitas Peran Pemerintah Desa Dalam Mengalokasikan Dana Desa Menurut Perspektif Ekonomi Islam”. oleh Dora Primapurnama Belaya Fakultas Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Jurusan Ekonomi Syari’ah UIN Raden Intan Lampung. Skripsi ini membahas tentang efektivitas peran desa dalam mengalokasikan dana desa menurut ekonomi islam, jenis penelitian ini yaitu *field reseach* dan bersifat kualitatif deskriptif. Dalam hal ini penulis hanya meneliti Peran Pemerintah Dalam Mengalokasikan dan Desa (ADD) di Desa Surabaya ilir Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah tahun 2017. Hasil penelitian Peran Pemerintah Desa Surabaya Ilir, kurang efektif dalam hal Transparansi Dana Desa, Akuntabel dalam Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa, Partisipatif dari Masyarakat Desa Surabaya Ilir, serta Disiplin dan Tertib Anggaran dalam Pengalokasian Dana Desa (ADD).
3. Skripsi yang berjudul: Peran Pemerintah Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Sumberpasir Kec. Pakis Kabupaten Malang). Oleh Abdul Juli Andi Gani Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang. Skripsi ini

membahasa tentang peran pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa Sumberpasir telah mampu memberdayakan masyarakat melalui beberapa program-program pemberdayaan yaitu: pertama pengaktifan kelembagaan, kedua peningkatan peran serta masyarakat dengan kegiatan pelaksanaan kerja bakti, perlombaan desa, musrenbang desa serta pembangunan Fisik, namun dalam melaksanakan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa Sumberpasir mengalami kendala-kendala partisipasi masyarakat yang kurang, budaya malas serta kurangnya fasilitas yang tersedia dalam mendukung kegiatan pemberdayaan.

4. Skripsi yang berjudul: Peran Pemerintah Desa Glagahwangi Sugihwaras Bojonegoro Dalam Pembangunan Desa Perspektif Fiqh Siyasah. Oleh Anis Yunus, Fakultas Syari'ah Jurusan Ekonomi Islam Universitas Negeri Mataram 2017. Skripsi ini membahas peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode kualitatif dan analisis data menggunakan metode analisis induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah desa terhadap perkembangan pasar tradisional dalam meningkatkan taraf hidup memberikan pengaruh untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa kekait.

5. Skripsi yang berjudul: Analisis Dampak Sosial Ekonomi Pasca Bencana di Kabupaten Pamekasan (Studi Kasus Banjir, Longsor dan Kekeringan di Pamekasan 2007). Oleh Qaiyim Asy'ari Institut Agama Islam Al-Khairat Pamekasan. Penelitian ini membahas dampak sosial ekonomi masyarakat akibat bencana alam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa Iklim di kabupaten Pamekasan tergolong iklim AW yaitu Iklim tropis, basah dan kering curah hujan yang jelas sekurang-kurangnya satu bulan < 60 mm (2,4 inch). Sedangkan menurut klasifikasi yang didasarkan atas bulan basah dan bulan kering untuk membantu usaha pertanian terutama padi, kabupaten pamekasan tergolong iklim D yang berarti secara umum tergolong daerah kering sehingga disepanjang kamarnya potensi bencana kekeringan dikabupaten pamekasan sangat rentan dan tersebar di 11 kecamatan dari 13 kecamatan di kabupaten pamekasan. Maksud dari kegiatan Penelitian dampak sosial ekonomi pasca bencana di kabupaten Pamekasan yaitu untuk mendapatkan data dan informasi tentang daerah rawan bencana serta dampak terhadap sosial ekonomi bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Aliyy Al-Qur'an* (Bandung: CV. Diponegoro, 2000).

B. Buku

Ali Ahmad as-Salus, *Aqidah al-Imamah 'Inda as-Syi'ah Al-Isna Asyariyah*, Tjmh (Jakarta: Gema Insani Prees, 1997).

C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, *Pemerintahan Daerah di Indonesia (Hukum Administrasi Daerah)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

Dedi Supriadi, *Ekonomi Mikro Islam* (Bandung: Pusaka Seti, 2013).

Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, Cet. 8 (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Damascus: Dar al-Qalam, 2007).

Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007).

Ibnu Syarif, et. al, *Fiqh siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008).

Jalaludin Rahmat, *Metodologi Penelitian Komunikasi* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000).

Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, Edisi 5 (Yogyakarta: Upp Stim Ykpn, 2015).

M.L. Jhingan, *Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

Mohammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006).

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet Ke-1 (Jakarta: Prenada Media, 2014).

- Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet ke-1 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).
- Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zana, *Fiqh Siyasah, dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga 2008).
- Mustofa Hasan Dikutip Dari Imam Tajjuddin Abd Al Wahab Al-Subki, *Al-Asybah Wa Al-Nazha'ir* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-`Ilmiyah, 1991).
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali, 2014).
- Rahardjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011).
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Sebagai Pengantar* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001).
- Soetomo, *Pemberdayaan Masyarakat*, Cet. I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Celaban Timur UH III/548, 2013).
- Sudano Sukirno, *Mikro Ekonomi: Teori Pengantar*, Ed. 3, Cet. 26 (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).
- Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013).
- Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research* (Bandung: Tarsoto, 1995).
- Susiadi AS, *Metodologi Penelitian* (Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014).
- Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Bandung: Sinar Baru, 1991).
- Tumar Sumihardjo, *Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Melalui Pengembangan Daya Saing Berbasis Potensi Daerah* (Bandung: Fokusmedia, 2008).

C. Artikel Majalah atau Harian

- Abdul Mustaqim, “Teologi Bencana Dalam Perspektif Al-Qur’an”, *Jurnal Nun*, Vol. 1 No. 1 (2015).
- Muhammad Ali, Erwin Asidah, Husmiati, “Peran Pemerintah Desa Terhadap Penyelesaian Permasalahan Korban Bencana Gempa”, *Jurnal JIAP*, Vol. 7, No. 2, (September Tahun 2019).
- Muhammad Harfin Zuhri, Ma, “Konsep Kepemimpinan dalam Perspektif Islam”. *Jurnal Hukum*, Vol 19 No.01 (Januari-Juni 2014).
- Peta Kordinat N45, E25, “Letak Kordinat Desa Way Muli Timur Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan”.
- Rahmawati, “Sistem Pemerintahan Islam menurut Al-Mawardi dan Aplikasinya di Indonesia”, *Jurnal Syari’ah dan Hukum*, Vol 16 No. 2 (Desember 2018).
- Ramanditya Wimbardana, et. al. “Perencanaan Pemulihan Sosial-Ekonomi Masyarakat Akibat Erupsi Gunung Merapi Tahun 2010”, *Jurnal Nasional Tata Lokal* (Universitas Diponegoro).
- Rosalina Kumalawati, “Dampak Banjir Lahar Pascaerupsi Gunungapi Merapi 2010”, Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian LPPM UMP 2014, (Purwokerto, 20 Desember 2014).
- Vidia Reski Awalia, Mappamiring, Andi Nuraeni, “Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Resiko Bencana Banjir di Kabupaten Kolaka Utara”, *Jurnal Ilmu Pemerintah*, Vol. V No. 2 (Oktober 2015).

D. Naskah Ilmiah

- Aditya Nugraha Putra, “Analisis Potensi Ekonomi Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: 2013).
- Nanin Trianawati Sugito, ST., MT, “*Tsunami*”, Jurusan Pendidikan Geografi, Universitas Pendidikan Indonesia (2008).

E. Peraturan Perundang-undangan dan Konvensi Internasional

- Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2011.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Bencana Alam.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 BAB VI
Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 18, 18A, dan 18B.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 BAB VI
Tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 18, 18A, dan 18B.

Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal
10 ayat 3.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintah di
Daerah.

F. Wawancara atau Surat

Arsip Dokumentasi Desa Way Muli Timur Kecamatan Rajabasa Kabupaten
Lampung Selatan Tahun 2015-2021.

Bpk. Darwin selaku Ketua Adat Desa Way Muli Timur, wawancara, di
Kantor Desa Way Muli Timur, tanggal 6 April 2020, pukul: 09.45
WIB.

Bpk. Santawi Qudratullah, Drs. Zamra Ghozali, Kepala dan Sekretris Desa
Way Muli Timur, wawancara, di Kantor Desa, tanggal 6 April, pukul:
09.30 WIB.

Bpk. Drs. Zamra Ghozali, Kepala Desa Way Muli Timur, wawancara, di
Kantor Desa Way Muli Timur, tanggal 6 April 2020, pukul: 09.30
WIB.

Bpk. Abus Priyansyah, Penduduk Desa Way Muli Timur, wawancara, di
Kantor Desa Way Muli Timur, tanggal 6 April 2020, pukul: 09.50
WIB.

Bpk. Andi, Maksum, Penduduk Desa Way Muli Timur, wawancara, di
Kantor Desa Way Muli Timur, tanggal 6 April 2020, pukul: 09.55
WIB.

Bpk. Suwono, Tokoh Masyarakat Desa Way Muli Timur, wawancara, di
Kantor Desa Way Muli Timur, tanggal 6 April 2020, pukul: 09.35
WIB.

Bpk. Suwono, Tokoh Masyarakat Desa Way Muli Timur, wawancara, di Kantor Desa Way Muli Timur, tanggal 6 April 2020, pukul: 10.00 WIB.

G. On-Line Informasi Via Internet

On-Line, tersedia di: <https://scholar.google.co.id/citations>, Zuhraini, kontribusi demokrasi Islam terhadap negara hukum pancasila”. Al-Adalah *Jurnal Hukum Islam*, Vol xII No. 1 (juni 2014).

On-line,tersediadi:<https://lampungtoday.com/2018/12/25/desa-waymulitimur-kecamatan-rajabasa-alami-kerusakan-terparah-tsunami-lamsel/>

